

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan bisa dikatakan sebagai masalah yang tiada henti mewarnai kehidupan setiap bangsa, tak terkecuali bagi Negara Negara yang telah berhimpun menjadi suatu kesatuan seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Dikarenakan sifat kompleks dan multidimensi tersebut, kemiskinan tak hanya mempengaruhi suatu objek dalam runtut waktu yang sama, melainkan kemiskinan mempunyai dampak beruntun yang dapat membuat individu seolah terjebak dalam kemiskinan. Seseorang yang saat ini miskin sebagai contohnya, mereka yang dikategorikan miskin bukan tidak mungkin dipengaruhi juga oleh kemiskinan yang ia alami di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan seseorang yang sudah tergolong miskin tidak bisa langsung begitu saja terlepas dalam belenggu kemiskinan.

Kemiskinan sendiri dalam arti *proper*, dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan

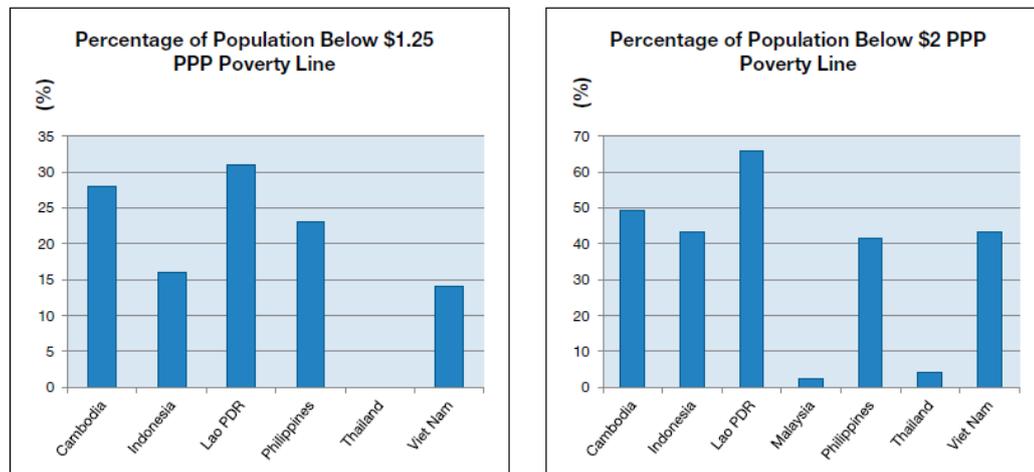
biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hal ini dibuktikan pada bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui delapan Millenium Development Goal (MDG) sebagai komitmen untuk meniadakan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia lainnya pada tahun 2015. MDG merupakan pernyataan paling kuat yang menunjukkan komitmen internasional untuk mengakhiri kemiskinan global. Seluruh Negara sangat menyadari sifat multidimensi dari pembangunan dan penanggulangan kemiskinan; mengakhiri kemiskinan memerlukan lebih dari sekedar peningkatan pendapatan orang-orang miskin. MDG telah menyediakan fokus bagi upaya bersama Negara-negara anggota PBB yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perjalanan organisasi dunia.¹ Senada dengan semangat tersebut Indonesia dalam Konstitusi UUD 1945, secara eksplisit sudah lebih dahulu mengakui hal itu pada pasal 27 ayat (2) yang tertulis bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.² Hal ini berarti memiliki pekerjaan dan hidup bebas dari kemiskinan merupakan hak asasi setiap warga Negara dan merupakan tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu.

¹ Michael P.Todaro, Stephen C.Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.29.

² Anonim, *UUD 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: Gradien Mediatama, 2011), h.37.

Dalam Negara ASEAN kita dapat melihat kondisi kemiskinannya pada grafik yang disajikan dibawah ini.



Grafik 1.1
Persentasi Populasi Pendapatan Penduduk dibawah \$1.25 dan \$2³

World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.⁴

Pada Grafik 1.1 terlihat bahwa pada 6 negara ASEAN masih memiliki cukup banyak populasi kemiskinan yang ditandai dengan penerimaan perkapita perharinya masih dibawah \$1,25 dan \$2. Laos merupakan Negara terbanyak memiliki populasi penduduk dengan pendapatan perkapita dibawah \$1,25 dengan angka 31% di bayangi oleh Kamboja dengan angka 28%, Filipina 23%, Indonesia

³ *ASEAN Statistical Yearbook 2014* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), h.218.

⁴ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h.196.

16%, Vietnam 14% dan Thailan 0,04 %. Pada garis kemiskinan dibawah \$2 Laos kembali menduduki urutan pertama dengan angka 66%, dilanjutkan kamboja dengan angka 49,5%, Indonesia dan Vietnam menyusul Filipina dengan angka 43,3%, sementara Filipina berada diposisi ke lima dengan angka 41,6%, diikuti Thailan dengan angka 4,1% dan Malaysia 2,3%. Angka tersebut merupakan angka yang cukup memprihatinkan bilamana membandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk di Negara tersebut.

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Dengan demikian pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan. Dalam pembangunan, terdapat tiga inti yang menjadi komponen dasar dan saling berkaitan dengan kebutuhan fundamental manusia di hampir semua masyarakat dan budaya disepanjang waktu, diantaranya;

- 1) Kecukupan : Kemampuan untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar.
Setiap individu memiliki kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan. Kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupan ini mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.
- 2) Harga Diri : Menjadi Manusia Seutuhnya.
Merupakan suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain.

- 3) Kebebasan dari Sikap Menghamba: Kemampuan Untuk Memilih
Pengertian kebebasan ini harus dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif, dan keyakinan dogmatis, khususnya yang menyatakan kemiskinan adalah nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan.⁵

Dalam tiga inti pembangunan tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya pembangunan diperuntukkan untuk dapat mandiri dan menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan sendiri tanpa adanya faktor-faktor yang membuat pembangunan tersebut terhambat sehingga seolah dibuat terpaksa untuk memilih pilihan yang ada.

Pemerintah setempat menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan demi menemukan langkah yang paling efektif. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Kendati demikian, mayoritas Negara ASEAN tergolong Negara berkembang yang memiliki banyak permasalahan dalam pembangunannya diantaranya adalah perkembangan penduduk yang cukup pesat.⁶

⁵ *Ibid*, h.28.

⁶ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.440.

Hal ini dibuktikan dalam tabel yang disajikan berikut ini.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Penduduk di ASEAN, 2009-2013⁷

<i>Country</i>	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
Brunei Darussalam	1.4	1.8	1.7	1.6	1.6
Cambodia	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Indonesia	1.2	2.7	1.8	1.4	1.4
Lao PDR	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0
Malaysia	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
Myanmar	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0
Philippines	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8
Singapore	3.1	1.8	2.1	2.5	1.6
Thailand	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5
Viet Nam	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1
ASEAN	1.4	1.9	1.5	1.3	1.3

Pada Tabel 1.1 dapat kita pahami bahwa pertumbuhan penduduk di Negara ASEAN masih tergolong cukup pesat, meski di beberapa Negara telah mampu mengurangi laju presentase pertumbuhan penduduk pertahunnya, namun penurunan angka tersebut masih tergolong fluktuatif. Hal inilah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah setempat untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya ditengah pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.

Ketika pertumbuhan penduduk yang cukup pesat terjadi akan menimbulkan

⁷ ASEAN Statistical Yearbook 2014 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), h.2.

efek domino bagi aspek lain yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat diantaranya dalam bidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan dalam hal ini pengangguran merupakan salah satu masalah umum bagi Negara berkembang karena masih adanya ketimpang populasi jumlah penduduk dengan lapangan kerja. Terutama jika kita membandingkan kondisi lapangan pekerjaan dikota dan didesa.

BPS mendefinisikan tenaga kerja melalui penggolongan umur, yakni setiap penduduk yang berada dalam usia produktif (15-64 tahun). Ada banyak penyebab terjadinya pengangguran di suatu Negara, salah satunya dalam bidang pendidikan yakni kualitas dari sumber daya manusia tersebut. Setiap perusahaan tentu menginginkan produktivitas yang maksimal dari karyawannya, sehingga perusahaan tersebut menekankan standarisasi karyawan yang akan diterima untuk bekerja, salah satu aspek yang cukup serius ialah pendidikan. Jika permasalahan pengangguran ini dibiarkan, akan menjadi polemik besar pada saat pembangunan ekonomi. Oleh karenanya, permasalahan pengangguran ini harus diusut secara tuntas oleh pemerintah setempat hingga ke akar, agar segala dampak dari pengangguran dapat diminimalisir, tak terkecuali untuk Negara di ASEAN yang memiliki tingkat pengangguran relatif tinggi.

Berikut data jumlah pengangguran pada Negara ASEAN.

Tabel 1.2.
Jumlah Pengangguran Usia 15 tahun keatas⁸

<i>Country</i>	<i>Unemployment rate of 15 years and over</i>				
	2009	2010	2011	2012	2013
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Brunei Darussalam	3.5	2.9	1.7	1.7	-
Cambodia	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3
Indonesia	5.8	5.5	5.0	6.1	6.2
Lao PDR	-	1.9	-	-	-
Malaysia	3.7	3.3	3.1	3.0	3.1
Myanmar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Philippines	7.1	7.1	6.4	6.8	6.4
Singapore	4.3	3.1	2.9	2.8	2.9
Thailand	1.5	1.0	0.7	0.7	0.7
Viet Nam	4.6	4.3	3.6	3.2	3.6

Pada Tabel 1.2, dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan Pengangguran mengalami keadaan yang fluktuatif. Namun pada tahun 2011-2013 mayoritas Negara ASEAN mengalami peningkatan laju pengangguran pertahunnya, meski ada beberapa Negara seperti Vietnam, Malaysia maupun Singapura mampu menurunkan laju pertumbuhan pengangguran

⁸ ASEAN Statistical Yearbook 2014 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), h.22.

pertahunnya pada tahun 2012, namun hal itu tidak bertahan lama, pada tahun 2013 negara tersebut kembali meningkat laju pertumbuhan pengangguran pertahunnya. Hal ini cukup mengejutkan karena diantara Negara tersebut salah satunya merupakan Negara Maju yang seharusnya dapat lebih mengontrol laju pertumbuhan pengangguran di negaranya.

Jika dikalkulasikan dengan jumlah penduduk di Negara ASEAN, tingkat pengangguran tersebut terbilang cukup tinggi. Lebih lengkapnya disajikan dalam data berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk ASEAN⁹

<i>Country</i>	2009 (000)	2010 (000)	2011 (000)	2012 (000)	2013 (000)
Brunei Darussalam	380	387	393	400	406
Indonesia	14,085	14,303	14,521	14,741	14,963
Lao PDR	6,128	6,256	6,385	6,514	6,644
Malaysia	28,082	28,589	29,062	29,518	29,948
Myanmar	59,130	59,780	60,384	60,976	61,568
Philippines	92,227	94,013	95,804	97,594	99,385
Singapore	4,988	5,077	5,184	5,312	5,399
Thailand	66,903	67,313	67,597	67,911	68,251
Viet Nam	86,024	86,932	87,840	88,773	89,709

⁹ ASEAN Statistical Yearbook 2014 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), h.2.

ASEAN	589,316	600,291	609,161	617,165	625,091
-------	---------	---------	---------	---------	---------

Pada Tabel 1.3 terlihat dengan cukup jelas bahwa jumlah penduduk di Negara ASEAN dapat terbilang cukup padat. Indonesia menduduki urutan pertama dalam populasi penduduknya, dilanjutkan Filipina, Viet Nam, Thailand, Myanmar, Malaysia, Kamboja, Sementara Laos, Singapura dan Brunei menduduki posisi 3 terbawah dalam populasi.

Banyak hal yang dapat menyebabkan laju pertumbuhan pengangguran tidak terbendung, diantaranya ialah masih timpangnya lapangan pekerjaan di perdesaan dan diperkotaan. Seperti yang telah dialami oleh mayoritas Negara berkembang yang harus mengkolaborasikan antara migrasi dan urbanisasi untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Sebuah teori yang menjelaskan hubungan yang tampak bersifat paradox mengenai adanya akselerasi migrasi desa-kota dalam konteks meningkatnya jumlah pengangguran diperkotaan dikenal sebagai model migrasi Todaro.¹⁰

Pengangguran yang cukup akrab dengan kemiskinan juga disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Tingkat pendidikan menjadi asas fundamental bagi seorang tenaga kerja karena berkaitan dengan *output* yang akan dihasilkan selama ia melaksanakan tugasnya. Seseorang yang memang sudah berkompeten dalam bidangnya tentu akan menghasilkan *output* yang lebih besar, oleh karenanya hal itulah yang menjadikan banyak perusahaan cukup serius memperhitungkan prihal taraf pendidikan karyawannya. Tentu setiap perusahaan menginginkan produktifitas yang semaksimal mungkin

¹⁰ Michael P.Todaro, Stephen C.Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.416.

dari setiap karyawan guna mendapatkan laba maksimum. Untuk mengukur tingkat pendidikan, diperoleh data tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah yang telah ditempuh oleh masyarakat di Negara ASEAN, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut

Tabel 1.4
Tingkat Partisipasi Penduduk Mengikuti Sekolah Dasar 2009-2013¹¹

<i>Country</i>	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Brunei Darussalam	97.5	97.4	-	-	-
Cambodia	94.4	94.8	95.2	97.0	95.6
Indonesia	94.4	94.8	91.0	92.5	95.6
Lao PDR	91.6	92.7	94.1	95.2	-
Malaysia	95.7	96.2	95.9	96.4	96.6
Myanmar	83.9	84.1	84.6	84.6	-
Philippines	89.2	89.4	89.9	-	-
Singapore	96.8	100.0	100.0	100.0	100.0
Thailand	-	86.0	-	97.6	98.8
Viet Nam	95.5	94.9	95.3	96.5	96.6

Pada Tabel 1.4 dapat kita pahami bahwa pada tahun 2009-2013 seluruh penduduk Negara ASEAN sudah menempuh pendidikan dasar diatas 80%. Di tahun 2012, Hanya Myanmar yang masih berkutat pada angka 84,6% sedangkan

¹¹ ASEAN Statistical Yearbook 2014 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), h.9.

Negara lainnya telah mampu melebihi angka 90%, bahkan Singapura telah mencapai angka 100% yang berarti seluruh penduduk Singapura telah menempuh pendidikan sekolah dasar. Namun pendidikan dasar saja belum cukup untuk menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu Negara.

Tabel 1.5
Tingkat Partisipasi Penduduk Mengikuti Sekolah Menengah 2009-2013¹²

<i>Country</i>	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Brunei Darussalam	-	97.0	-	-	-
Cambodia	24.9	26.0	27.6	-	-
Indonesia	67.4	67.7	68.1	70.8	70.7
Lao PDR	36.8	33.9	33.4	34.7	-
Malaysia	90.0	89.6	89.8	90.2	91.1
Myanmar	44.7	45.5	47.2	47.5	-
Philippines	60.5	59.9	60.9	-	-
Singapore	95.2	98.3	98.8	98.8	99.3
Thailand	-	-	-	-	-
Viet Nam	-	-	-	-	-

Pada Tabel 1.5 cukup jelas terlihat bahwa masih ada Negara ASEAN yang setengah dari jumlah penduduknya belum mengenyam pendidikan sekolah

menengah. Hingga data terakhir yang didapatkan, Kamboja, Laos dan Myanmar

¹² ASEAN Statistical Yearbook 2014 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), h.10.

masih belum beranjak dari angka dibawah 50% dari total penduduknya. Indonesia masih bertahan pada kisaran 70%, hanya Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam yang sudah berhasil melewati angka 90%. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja, karena awal mulanya taraf pendidikan yang menjadi tolak ukur tenaga kerja adalah pendidikan menengah, dengan begitu berarti masih banyak tenaga kerja yang belum menempuh pendidikan menengah, meski setiap tahunnya dari keseluruhan Negara ASEAN mengalami tren peningkatan terhadap partisipasi pendidikan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu negara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. PDB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Semakin tinggi PDB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Tingginya tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) tidak serta merta menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhitungkan aspek-aspek yang turut mempengaruhi kesejahteraan, seperti tidak mencerminkan daya beli masyarakat, serta apabila terjadinya ketimpangan yang cukup besar di Negara tersebut seperti ketimpangan antara kota dan desa tertinggal. Kendati demikian PDB per kapita masih dianggap sebagai salah satu cara yang mendekati riil untuk mengukur seberapa jauh tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Untuk melihat

tingkat PDB per kapita Negara ASEAN perhatikan tabel berikut.

Tabel 1.6
PDB Per Kapita 2009-2013¹³

<i>Country</i>	2009 (US\$)	2010 (US\$)	2011 (US\$)	2012 (US\$)	2013 (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Brunei Darussalam	28,454	32,063	42,431	42,445	39,679
Cambodia	735	785	882	950	1,037
Indonesia	2,359	2,988	3,498	3,563	3,460
Lao PDR	913	1,079	1,262	1,443	1,548
Malaysia	7,216	8,515	9,962	10,346	10,420
Myanmar ²⁾	538	706	853	885	888
Philippines	1,829	2,127	2,339	2,568	2,707
Singapore	38,577	46,570	52,865	54,007	55,182
Thailand	3,947	4,743	5,116	5,391	5,679
Viet Nam	1,232	1,338	1,543	1,755	1,909
ASEAN	2,610	3,162	3,619	3,781	3,832

Pada data yang tersaji dalam Tabel 1.6 dapat kita pahami bahwa PDB perkapita pada mayoritas Negara ASEAN masih belum cukup untuk mencapai kata sejahtera. Hanya dibebberapa Negara seperti Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia yang PDB perkapita diatas 10,000 US\$, sementara penduduk Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos masih menerima PDB perkapita

¹³ ASEAN Statistical Yearbook 2014 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), h.40.

dibawah 6000 US\$, bahkan masyarakat Kamboja dan Myanmar hanya mendapatkan PDB per kapita dibawah 1100 US\$.

Kesehatan merupakan indikator yang cukup jelas untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah Negara. Jika sumber daya manusiannya tinggi, maka output yang dihasilkan akan tinggi pula, sehingga hal itupun turut mempengaruhi suatu daerah berkategori miskin atau tidak. Pada tabel dibawah ini akan disajikan data mengenai tingkat kesehatan pada Negara ASEAN yang dicerminkan oleh angka harapan hidup.

Tabel 1.7
Angka Harapan Hidup 2009-2013¹⁴

Country	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Brunei Darussalam	77.6	77.7	77.1	78.1	77.1
Cambodia	63.8	64.5	65.2	-	68.9
Indonesia	70.7	70.9	69.7	69.9	70.7
Lao PDR	-	64.7	65.4	66.1	66.9
Malaysia	73.9	73.9	73.9	74.4	-
Myanmar	66.5	66.6	67.1	67.1	-
Philippines	68.9	68.9	70.4	-	-
Singapore	81.4	81.7	81.9	82.1	82.5
Thailand	-	-	74.1	74.2	-
Viet Nam	72.8	72.9	73.0	73.0	73.1

Pada Tabel 1.7 yang sudah tersaji dapat dipahami bahwa angka harapan hidup pada mayoritas Negara ASEAN masih terbilang rendah. Pada tahun 2011 misalnya tak ada satupun Negara yang mencapai angka harapan hidup 85 %,

¹⁴ ASEAN Statistical Yearbook 2014 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), h.16.

hanya Singapura yang angka harapan hidupnya menyentuh angka 81.9% sementara itu Negara lainnya banyak dibawah Singapura, bahkan banyak diantaranya masih berada pada kisaran dibawah 70%, seperti Indonesia dengan angka 69.7%, Myanmar dengan angka 67.1%, Laos dengan angka 65.4% serta Kamboja dengan angka 65.2%.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circke of poverty*) dari Nurkse. Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya Pendidikan), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti akan mengambil beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi kemiskinan di ASEAN seperti perkembangan penduduk yang cukup pesat, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, PDB perkapita serta tingkat kesehatan. Pemilihan sampel pada 5 Negara tersebut berdasarkan pertimbangan presentase

terendah dari rata-rata keseluruhan faktor penyebab kemiskinan yang sudah peneliti jabarkan. Adapun peneliti menyertakan Negara Indonesia didalamnya dikarenakan Indonesia memiliki sumber daya alam dan manusia yang lebih kuantitasnya melebihi Negara lainnya pada himpunan Negara se-ASEAN, sehingga seharusnya Indonesia dapat lebih sejahtera dibanding Negara lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tingkat kemiskinan di ASEAN di sebabkan oleh:

1. Pengaruh perkembangan penduduk terhadap kemiskinan di ASEAN.
2. Pengaruh jumlah pengangguran terhadap kemiskinan di ASEAN.
3. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di ASEAN.
4. Pengaruh PDB perkapita terhadap kemiskinan di ASEAN.
5. Pengaruh tingkat kesehatan terhadap kemiskinan di ASEAN.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dalam penelitian ini hanya membahas pada kemiskinan saat ini yang dipengaruhi dengan ukuran kesejahteraan ditahun sebelumnya yang diwakili oleh:

1. Pengaruh jumlah pengangguran terhadap kemiskinan di ASEAN.
2. Pengaruh jumlah PDB perkapita berpengaruh terhadap kemiskinan di ASEAN.
3. Pengaruh jumlah pengangguran, dan jumlah PDB perkapita terhadap kemiskinan di ASEAN.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

4. Apakah jumlah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di ASEAN?
5. Apakah jumlah PDB perkapita berpengaruh terhadap kemiskinan di ASEAN?
6. Apakah jumlah pengangguran, dan jumlah PDB perkapita mempengaruhi kemiskinan di ASEAN?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kemiskinan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai instrum ketenagakerjaan dan penambahan PDB dalam mempengaruhi kemiskinan.

BAB II

KAJIAN TEORETIK